

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Audit dan Standar Audit**

Audit adalah poses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara obyektif bukti yang berkaitan dengan penilaian berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan. Profesi audit terdiri atas beberapa jenis audit yang masing – masing memiliki perspektif, tujuan dan organisasi profesinya sendiri – sendiri. Namun demikian, semua jenis audit mengikuti proses, petunjuk dan standar umum, yang masing – masing memiliki perbedaan dalam beberapa hal.(Utomo & Suhartono, 2018)

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti – bukti secara obyektif mengenai asersi – asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi – asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.(Haryati dkk, 2022)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan audit adalah proses sistematis yang berisikan serangkaian langkah yang dilakukan secara logis dan terstruktur untuk mengevaluasi temuan bukti secara obyektif terkait kegiatan ekonomi dan berbagai pernyataan manajemen berdasarkan pada aturan yang berlaku.

Standar dalam praktik auditing diatur dalam **Standar Audit (SA) dengan** seri 100 – 700 yang diterapkan untuk suatu audit atas laporan keuangan dan disesuaikan seperlunya jika diterapkan pada **audit** atas informasi keuangan historis lainnya (IAPI, 2023).

#### **2.2 Pengendalian Internal**

Berdasarkan Standar Audit 315 paragraf 4 (c) tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya (IAPI, 2021):

Pengendalian internal: Proses yang didesain, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan

suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah beberapa definisi pengendalian internal dari berbagai sumber menurut para ahli (Sudarmanto dkk, 2021):

1. COSO (*Committee of Sponsoring Organization*)  
COSO merupakan komite yang membuat kerangka konsep pengendalian internal yang banyak digunakan oleh perusahaan nasional maupun multinasional saat ini. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang dalam rangka memberikan jaminan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui:
  - a. efisiensi dan efektivitas produksi;
  - b. penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. IFAC (*International Federation of Accountants*)  
IFAC mendefinisikan pengendalian internal sebagai sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi.
3. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)  
Sedangkan menurut OJK, pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas, ditarik kesimpulan terkait definisi pengendalian internal yaitu sebuah sistem yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi dalam mengatur segala sesuatu aktivitas di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dalam pelaksanaan pengendalian internal yang bertanggung jawab bukan hanya pemilik atau pimpinan organisasi, namun seluruh anggota organisasi di dalamnya meskipun pada awalnya pengendalian internal dibuat dan diamanatkan oleh dewan direksi atau pimpinan.

## **2.3 Tujuan, Jenis dan Unsur Pengendalian Internal**

### **2.3.1 Tujuan Pengendalian Internal**

Tujuan utama pengendalian internal adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara mendapatkan kesempatan dan keuntungan serta mencegah

adanya risiko kerugian, termasuk mencegah adanya tindak kecurangan karyawan seperti *administration fraud* atau *financial fraud*. Sedangkan tujuan lainnya dari pengendalian internal adalah (Sudarmanto dkk., 2021):

1. Menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercayadan dipertanggungjawabkan.
2. Memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaansumber daya perusahaan.
4. Memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui danmematuhi kebijakan yang telah dibuat.
5. Menjaga aset perusahaan.
6. Menjamin keamanan operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan, menghasilkan informasi yang andal, menjaga keberlangsungan perusahaan serta mencegah perusahaan mengalami kerugian melalui cara yang telah ditetapkan.

### **2.3.2 Jenis Pengendalian Internal**

Ditinjau berdasarkan tujuannya, pengendalian internal dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu (Sudarmanto dkk, 2021):

1. Pengendalian internal akuntansi, yaitu pengendalian yang meliputi persetujuan, keandalan data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, pencatatan, hingga pengawasan aset atas kekayaan.
2. Pengendalian internal administrasi, yaitu pengendalian yang meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis risiko, manajemen sumber daya hingga pengendalian mutu.

Sedangkan ditinjau berdasarkan sifatnya. Secara umum, pengendalian internal termasuk dalam tiga kategori berikut (Munawar dkk, 2023):

1. Pengendalian preventif adalah prosedur atau tindakan yang digunakan untuk mencegah dugaan kesalahan atau ketidakberesan.
2. Pengendalian detektif yaitu sebaliknya yang merupakan sarana yang diadopsi untuk mengidentifikasi celah.
3. Pengendalian korektif adalah yang membantu memperbaiki kekurangan yang terdeteksi, yang dapat menyebabkan masalah keuangan atau reputasi lebih lanjut bagi organisasi.

Berdasarkan uraian di atas jenis pengendalian internal berdasarkan tujuannya dibagi ke dalam dua jenis yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi sedangkan berdasarkan sifatnya pengendalian internal terbagi menjadi tiga kategori yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif dan pengendalian korektif.

### **2.3.3 Unsur Pengendalian Internal**

Ditinjau dari unsur yang terdapat dalam pengendalian internal, di dalamnya terdapat beberapa unsur antara lain (Sudarmanto dkk, 2021):

1. Struktur yang mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas. Sebagai contoh, dalam akuntansi harus ada dua orang yang bertugas secara berbeda yaitu orang yang bertugas menerima transaksi dan orang yang bertugas mencatat transaksi keuangan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan unsur laporan keuangan. Contohnya pengendalian internal terhadap kas perusahaan.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi unit secara sehat. Contohnya memberikan hak cuti (wajib) bagi karyawan secara berkala dan aktivitas audit administrasi.
4. Mutu karyawan yang kompeten untuk mengemban tanggung jawab. Misalnya dengan menciptakan dan membangun tata kelola karyawan yang baik mulai dari seleksi hingga pengembangan karyawan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam pengendalian internal suatu perusahaan atau organisasi yaitu terdapat struktur yang jelas dan tegas untuk memisahkan tanggung jawab fungsional, memiliki sistem wewenang dan prosedur, melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sehat dan memiliki mutu karyawan yang kompeten.

### **2.4 Komponen Pengendalian Internal**

Berdasarkan Standar Audit (SA) 315 tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya pada paragraf 4(c), 14 – 24 dan A77 – A121 menjelaskan komponen pengendalian internal sebagai berikut (IAPI, 2021):

1. Lingkungan Pengendalian  
Lingkungan pengendalian meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Komunikasi dan penegakan nilai integritas dan etika.
  - b) Komitmen terhadap kompetensi.
  - c) Partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
  - d) Falsafah dan gaya operasi manajemen.
  - e) Struktur organisasi.
  - f) Penugasan wewenang dan tanggung jawab.
  - g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
2. Penilaian Risiko
- a) Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku, mengestimasi signifikansi risiko bisnis tersebut, menilai kemungkinan keterjadiannya, dan memutuskan tindakan untuk merespons dan mengelola risiko tersebut beserta hasil proses penilaian risiko tersebut. Sebagai contoh, proses penilaian risiko entitas dapat diarahkan untuk melihat bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi tidak tercatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang tercantum dalam laporan keuangan.
  - b) Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal mencakup peristiwa, transaksi, atau kondisi eksternal dan internal yang dapat terjadi dan memengaruhi secara buruk kemampuan entitas untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Manajemen dapat menginisiasi rencana, program, atau tindakan untuk merespons risiko tertentu atau manajemen dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko karena pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya. Risiko dapat muncul atau berubah karena kondisi-kondisi seperti sebagai berikut:
    - Perubahan dalam lingkungan operasi.
    - Personel baru.
    - Sistem informasi baru atau yang ditingkatkan.
    - Pertumbuhan yang pesat
    - Teknologi baru.
    - Model, produk, atau aktivitas bisnis baru.
    - Restrukturisasi.
    - Ekspansi entitas di luar negeri.
    - Standar akuntansi baru.
3. Aktivitas Pengendalian
- a) Pada umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan suatu audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
    - Penelaahan kinerja.

- Pengolahan informasi.
  - Pengendalian fisik.
  - Pemisahan tugas.
- b) Aktivitas pengendalian tertentu dapat bergantung pada eksistensi kebijakan tingkat lebih tinggi yang tepat yang ditetapkan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
4. Pemantauan Pengendalian
- a) Tanggung jawab penting manajemen adalah untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal secara berkelanjutan. Pemantauan pengendalian oleh manajemen mencakup pertimbangan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan dan pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana diperlukan sehubungan dengan perubahan dalam kondisi. Pemantauan pengendalian dapat mencakup aktivitas seperti evaluasi auditor internal atas kepatuhan personel penjualan terhadap kebijakan entitas atas ketentuan kontrak penjualan dan pengawasan departemen legal atas kepatuhan terhadap kebijakan etika atau kebijakan praktik bisnis. Pemantauan juga dilakukan untuk menjamin bahwa pengendalian beroperasi secara efektif secara berkelanjutan sepanjang waktu.
- b) Auditor internal atau personel yang melaksanakan fungsi serupa dapat memberikan kontribusi untuk memantau pengendalian entitas melalui evaluasi secara terpisah. Pada umumnya, mereka menyediakan informasi reguler tentang keberfungsian pengendalian internal, pemusatan perhatian yang cukup besar atas pengevaluasian efektivitas pengendalian internal, serta pengomunikasian informasi tentang kekuatan dan defisiensi pengendalian internal dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal.
- c) Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi yang berasal dari komunikasi dengan pihak eksternal yang dapat mengindikasikan masalah atau area yang menjadi perhatian yang memerlukan perbaikan. Di samping itu, manajemen dapat mempertimbangkan komunikasi yang diperoleh dari auditor eksternal yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam melaksanakan aktivitas pemantauan.

Sedangkan menurut (Hayes et al., 2019) Pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang saling terkait berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian  
Lingkungan pengendalian menetapkan suatu corak organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang – orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain. Lingkungan pengendalian mencakup

hal – hal berikut:

- a. Integritas dan nilai etika
  - b. Komitmen terhadap kompetensi
  - c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
  - d. Struktur organisasi
  - e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
  - f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penaksiran Risiko
- Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:
- a. Perubahan dalam lingkungan operasi
  - b. Personel baru
  - c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
  - d. Teknologi baru
  - e. Lini produk, produk atau aktivitas baru
  - f. Restrukturisasi korporasi
  - g. Operasi luar negeri
  - h. Standar akuntansi baru
3. Aktivitas Pengendalian
- Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menaggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal – hal berikut ini:
- a. *Review* terhadap kinerja
  - b. Pengolahan informasi
  - c. Pengendalian phisik
  - d. Pemisahan tugas
4. Informasi dan Komunikasi
- Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami:
- a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan
  - b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai
  - c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dana tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.

- d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (*electronic data interchange*) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara dan mengakses informasi.
5. Pemantauan  
Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau engan berbagai kombinasi dari keduanya. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan *Customers* dan komentar dari badan pengatur yang dapat diberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komponen – komponen pengendalian internal terdiri dari lima komponen penting yang saling berkaitan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasidan komunikasi serta pemantauan.

## 2.5 *Fraud* (Kecurangan)

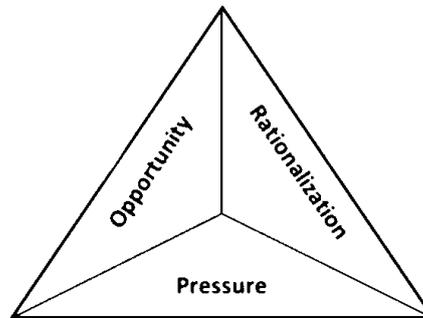
Menurut Andari & Ismatullah (2019) “*Fraud* (Kecurangan) merupakan penipuan (*deception*), penyembunyian (*concealment*) dan penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*)”.

Kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dari dalam atau luar perusahaan, dengan tujuan untukmendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya dimana tindakan tersebutmerugikan orang lain (Ramlah dkk, 2023).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *fraud* (kecurangan) merupakan tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu yang menyebabkan kerugian pihak lain.

## 2.6 Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud* (Kecurangan)

Tindakan *fraud* (kecurangan) terjadi karena adanya seperangkat kondisi yang kondusif bagi terjadinya tindakan tersebut. Dalam teori segitiga perilaku kecurangan (*fraud triangle theory*) didukung oleh tiga unsur. Tiga unsur tersebut digambarkan dalam segitiga sama sisi yaitu sebagai berikut (Sakti & Tarjo, 2022):



**Gambar 2.1** *Fraud Triangle Theory*

1. Tekanan (*pressure*)  
Pendorong untuk melakukan kecurangan terjadi pada karyawan dan oleh manajer. Dorongan tersebut terjadi antara lain karena:
  - a. Tekanan keuangan
  - b. Kebiasaan buruk
  - c. Tekanan lingkungan kerja
  - d. Tekanan lain
2. Kesempatan (*opportunity*)  
Kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Disamping itu beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan yaitu :
  - a. Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan
  - b. Keterbatasan akses terhadap informasi
  - c. Ketidaktahuan, malas dan tidak sesuai kemampuan pegawai
  - d. Kurangnya jejak audit.
3. Pembeneran (*rationalization*)  
Pelaku kecurangan mencari pembeneran antara lain:
  - a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
  - b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas faktor penyebab terjadinya *fraud* (Kecurangan) dikategorikan menjadi tiga faktor yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran (*Rationalization*).

## 2.7 Pencegahan *Fraud* (Kecurangan)

Salah satu cara paling efektif untuk menangani masalah *fraud* adalah pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* bertujuan untuk menekan peluang dan menghilangkan keinginan *fraudster*. Beberapa cara untuk memperkuat pencegahan *fraud* yaitu (Sakti & Tarjo, 2022):

- a. Strategi anti – *fraud*  
Secara umum strategi anti – *fraud* yang baik memiliki empat komponen utama yaitu pencegahan, deteksi, *deterrence* dan respons.
- b. Mengembangkan budaya etis yang sehat  
Beberapa cara untuk menciptakan budaya yang etis sebagai berikut:
  - Visi misi organisasi harus mengacu pada kualitas etika dan mendefinisikan bagaimana organisasi ingin dianggap secara eksternal.
  - Kebijakan yang jelas mengenai etika bisnis anti – *fraud* serta dengan penjelasan tentang perilaku yang dapat diterima dalam situasi rawan risiko.
  - Kemudahan pelaporan pelanggaran etika.
  - Pengingat tentang kebijakan etika.
  - Manajemen yang berkomitmen dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- c. Penilaian berkala atas risiko *fraud*  
Organisasi secara berkala harus terus mengidentifikasi risiko *fraud* dalam organisasi mereka. Risiko *fraud* harus diidentifikasi untuk semua area dan proses bisnis dan kemudian dinilai dari segi dampaknya. Selain dampak moneter, penilaian harus mempertimbangkan faktor non – keuangan seperti reputasi. Penilaian risiko *fraud* yang efektif akan menyoroti risiko yang sebelumnya tidak teridentifikasi dan memperkuat kemampuan pencegahan dan pendeteksian *fraud* secara tepat waktu. Peluang untuk penghematan biaya juga dapat diidentifikasi sebagai hasil dari penilaian risiko *fraud*.
- d. Pelatihan dan kesadaran risiko  
Hampir setiap kali *fraud* besar terjadi karena tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran melalui program pendidikan dan pelatihan formal sebagai bagian dari strategi manajemen risiko secara keseluruhan. Perhatian

husus harus diberikan kepada manajer dan staf yang beroperasi di area berisiko tinggi, seperti pengadaan dan pembayaran tagihan, dan kepada mereka yang berperan dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

- e. Mekanisme pelaporan dan *whistleblowing*  
Membangun mekanisme pelaporan yang efektif adalah salah satu elemen kunci dari program pencegahan *fraud* dan berdampak positif pada deteksi *fraud*. Banyak *fraud* yang diketahui atau dicurigai oleh orang – orang yang tidak terlibat. Tantangan bagi manajemen adalah untuk mendorong orang – orang yang merasa tidak bersalah atau terkait untuk angkat bicara untuk menunjukkan bahwa itu adalah kepentingan mereka sendiri. Organisasi yang mendorong keterbukaan dan dapat mengatasi budaya diam kemungkinan besar akan mendapatkan manfaat besar dalam banyak hal.
- f. Pengendalian internal  
Pengendalian internal terdiri dari semua kebijakan dan prosedur yang diambil bersama – sama, mendukung operasi organisasi yang efektif dan efisien. Pengendalian internal biasanya berhubungan dengan faktor – faktor seperti proses persetujuan dan otorisasi, pembatasan akses, pengendalian transaksi, dan keamanan fisik. Prosedur – prosedur ini sering kali mencakup pembagian tanggung jawab dan *checks and balances* untuk mengurangi risiko. Jumlah dan jenis pengendalian internal yang dapat diperkenalkan oleh suatu organisasi bergantung pada sifat dan ukuran organisasi. Pengendalian internal ini bertujuan untuk meminimalkan *fraud* dan jika memungkinkan dapat mengatasi *redflag*.
- g. Pemeriksaan kepada pra – kerja  
Penyaringan pra – kerja adalah proses verifikasi kualifikasi, kesesuaian dan pengalaman calon perkerja potensial. Teknik yang digunakan meliputi konfirmasi kualifikasi pendidikan dan profesional, verifikasi latar belakang perkerjaan, penelusuran riwayat kriminal dan pemeriksaan kredit.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan cara pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menerapkan strategi anti – *fraud*, Mengembangkan budaya etis yang sehat, Penilaian berkala atas risiko *fraud*, pelatihan dan kesadaran risiko, Mekanisme pelaporan dan *whistleblowing*, pengendalian internal dan Pemeriksaan kepada pra – kerja.